



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

**INDIKATOR KINERJA
UTAMA (IKU)
INSPEKTORAT
KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2019**





**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
INSPEKTORAT KABUPATEN**

Jl. Diponegoro No 01 Telp/Fax (0565) 21008/21738 Sintang-7861

=====

**KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN SINTANG
NOMOR : 786/ 24 /KEP-ITKAB/2019**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
INSPEKTORAT KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2019**

INSPEKTUR KABUPATEN SINTANG,

Menimbang : bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintahan, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Sintang Tahun 2019 dalam suatu Keputusan Inspektur Kabupaten Sintang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2441, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Peraturan...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
10. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 25 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang;

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Daerah;

2. Peraturan...

2. Peraturan Bupati Sintang Nomor 107 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sintang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Sekretariat dan masing-masing bidang di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Sintang, untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, untuk menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen.
- KEDUA** : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh Sekretaris dan setiap Inspektur Pembantu serta disampaikan kepada Inspektur Kabupaten Sintang.
- KETIGA** : Dalam rangka lebih meningkatkan Efektifitas pelaksanaan Keputusan Inspektur Kabupaten Sintang ini, Sekretaris Inspektorat kabupaten Sintang diberikan tugas untuk :
- 1) Melakukan Review atas Capaian Kinerja setiap Bidang dalam rangka akurasi data dan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja.
 - 2) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan ini dan melaporkan kepada Inspektur Kabupaten Sintang.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sintang

Pada tanggal 02 Januari 2019

INSPEKTUR KABUPATEN SINTANG



APOLONARIS BIONG, S.Sos, M.Si

SINTANG BINA UTAMA MUDA

NIP. 19600723 198011 1 001

Tembusan :

1. Bupati Sintang di Sintang (sebagai laporan).
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
5. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Sintang di Sintang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN SINTANG
NOMOR : 786/ 24 /KEP-ITKAB/2019
TANGGAL : 02 JANUARI 2019
PERIHAL : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT KABUPATEN SINTANG TAHUN 2019

1. Nama SKPD : Inspektorat Kabupaten Sintang
2. Tugas Pokok : Membantu bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
3. Fungsi : Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud, Inspektorat Kabupaten Sintang mempunyai fungsi :
 1. Perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan perangkat daerah dan desa;
 2. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 3. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
 4. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati;
 5. Penyusunan hasil pengawasan;
 6. Penyelenggaraan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah (MPPKN/MPPKD);
 7. Pengorganisasian kesekretariatan, Inspektur Pembantu dan Auditor;
 8. Pengembangan Aparatur Sipil Negara pada Inspektorat;
 9. Penanganan Pengaduan Masyarakat;
 10. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 11. Penyusunan perjanjian kinerja;
 12. Penyusunan analisa jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan;
 13. Pelaksanaan pencegahan dan penanganan tindak pidana korupsi;
 14. Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
 15. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT
KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2019**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Pengukuran	Alasan Pemilihan Indikator	Sumber Data	Ket
1.	Meningkatnya profesionalisme dan kapasitas aparat pengawas	Jumlah aparat pengawas (pejabat fungsional dari 42 menjadi 75)	Jumlah pejabat fungsional yang mengikuti Diklat _____ x 100% Jumlah target pejabat fungsional yang mengikuti diklat	Untuk mengetahui apakah jumlah pejabat fungsional yang mengikuti Diklat telah sesuai dengan target yang ditentukan	Sekretariat (Sub Bagian Umum)	Output
		Jumlah aparat pengawas yang mengikuti diklat teknis dan kapabilitas sumber daya aparatur pengawasan (66 orang)	Jumlah aparat pengawas yang mengikuti Diklat _____ x 100% Jumlah target aparat pengawas yang mengikuti diklat	Untuk mengetahui apakah jumlah aparat pengawas yang mengikuti Diklat telah sesuai dengan target yang ditentukan.	Sekretariat (Sub Bagian Umum)	
2.	Meningkatnya jumlah regulasi/kebijakan pengawasan yang diterbitkan	Jumlah regulasi/kebijakan pengawasan	Jumlah regulasi/kebijakan pengawasan yang diterbitkan _____ x 100% Jumlah target regulasi/kebijakan pengawasan yang diterbitkan	Untuk mengetahui apakah capaian regulasi/kebijakan pengawasan yang diterbitkan telah sesuai dengan target yang ditentukan.	Sekretariat, Irban Bidwas I, Bidwas II, Bidwas III, Bidwas IV dan Bidwas V	Output

3.	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan	Prosentase jumlah temuan hasil pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti	Prosentase jumlah temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti $\frac{\text{_____}}{\text{Target prosentase jumlah temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti}} \times 100\%$	Untuk mengetahui apakah temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti telah sesuai dengan target yang ditentukan.	Sekretariat (Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi)	Outcome
		Prosentase kerugian daerah yang selesai ditindaklanjuti	Prosentase kerugian daerah yang selesai ditindaklanjuti $\frac{\text{_____}}{\text{Target Prosentase kerugian daerah yang selesai ditindaklanjuti}} \times 100\%$	Untuk mengetahui apakah Prosentase kerugian daerah yang selesai ditindaklanjuti telah sesuai dengan target yang ditentukan.	Sekretariat (Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi)	Outcome
		Jumlah inventarisasi penetapan TP-TGR (Sidang TP-TGR)	Jumlah inventarisasi penetapan TP-TGR (Sidang TP-TGR) yang dilaksanakan $\frac{\text{_____}}{\text{Jumlah target inventarisasi penetapan TP-TGR (Sidang TP-TGR) yang dilaksanakan}} \times 100\%$	Untuk mengetahui apakah jumlah inventarisasi penetapan TP-TGR (Sidang TP-TGR) yang dilaksanakan telah sesuai dengan target yang ditentukan.	Sekretariat (Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi)	Outcome
		Peningkatan sistem informasi monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan	Jumlah aplikasi yang digunakan $\frac{\text{_____}}{\text{Jumlah target aplikasi yang digunakan}} \times 100\%$	Untuk mengetahui apakah jumlah aplikasi yang digunakan telah sesuai dengan target yang ditentukan.	Sekretariat (Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi)	Outcome

4.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengawasan berkala	Jumlah obyek pemeriksaan berkala yang diperiksa	$\frac{\text{Jumlah obyek pemeriksaan berkala yang diperiksa}}{\text{Jumlah target obyek pemeriksaan berkala yang diperiksa}} \times 100\%$	Untuk mengetahui apakah jumlah obyek pemeriksaan berkala yang diperiksa telah sesuai dengan target yang ditentukan.	Bidwas I dan Bidwas II	Output
5.	Meningkatnya penyelesaian jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dengan pemeriksaan	Prosentase kasus/khusus yang diperiksa	$\frac{\text{Prosentase kasus/khusus yang diperiksa}}{\text{Target Prosentase kasus/khusus yang diperiksa}} \times 100\%$	Untuk mengetahui apakah Prosentase kasus/khusus yang diperiksa telah sesuai dengan target yang ditentukan.	Bidwas IV	Outcome
6.	Meningkatnya hasil evaluasi SAKIP SKPD	Jumlah SKPD yang dievaluasi	$\frac{\text{Jumlah SKPD yang dievaluasi}}{\text{Jumlah target SKPD yang dievaluasi}} \times 100\%$	Untuk mengetahui apakah jumlah SKPD yang dievaluasi telah sesuai dengan target yang ditentukan.	Bidwas IV	Output
		Jumlah SKPD dengan nilai SAKIP kategori Baik	$\frac{\text{Jumlah SKPD dengan nilai SAKIP kategori Baik}}{\text{Jumlah SKPD dengan nilai SAKIP kategori Baik}} \times 100\%$	Untuk mengetahui apakah jumlah SKPD dengan nilai SAKIP kategori Baik telah sesuai dengan target yang ditentukan.	Bidwas IV	Outcome
7.	Meningkatnya SKPD yang bebas korupsi	Jumlah SKPD yang menerapkan SPIP	$\frac{\text{Jumlah SKPD yang menerapkan SPIP}}{\text{Jumlah target SKPD yang menerapkan SPIP}} \times 100\%$	Untuk mengetahui apakah jumlah kegiatan pengendalian SKPD yang menerapkan SPIP telah sesuai dengan target yang ditentukan.	Bidwas III	Outcome

		Jumlah SKPD yang menerapkan Waskat	Jumlah SKPD yang menerapkan Waskat _____ x 100% Jumlah target SKPD yang menerapkan Waskat	Untuk mengetahui apakah jumlah SKPD yang menerapkan Waskat telah sesuai dengan target yang ditentukan.	Bidwas III	Outcome
		Jumlah SKPD yang diusulkan sebagai Zona Integritas atau berstatus WBK/WBBM	Jumlah SKPD yang diusulkan sebagai Zona Integritas atau berstatus WBK/WBBM _____ x 100% Jumlah target SKPD yang diusulkan sebagai Zona Integritas atau berstatus WBK/WBBM	Untuk mengetahui apakah jumlah SKPD yang diusulkan sebagai Zona Integritas atau berstatus WBK/WBBM telah sesuai dengan target yang ditentukan.	Bidwas III	Outcome
		Prosentase pejabat yang telah menyampaikan LHKPN	Prosentase pejabat yang telah menyampaikan LHKPN _____ x 100% Target Prosentase pejabat yang telah menyampaikan LHKPN	Untuk mengetahui apakah Prosentase pejabat yang telah menyampaikan LHKPN telah sesuai dengan target yang ditentukan.	Bidwas III	Outcome

INSPEKTUR KABUPATEN SINTANG,



APOLONARIS BIONG